

# MERAJUT KEMBALI KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA DI INDONESIA

Oleh : Budi Sayoga

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada.  
E-mail : budisayoga@gmail.com

## Abstract

*Indonesia is a nation-state that have heterogeneous pattern in various aspects. This condition is potential for friction, conflict, and communicational gap between ethnic/tribal to happen. To minimize the occurrence of inter-ethnic conflict, a bond of communication between cultures that is equal and convergent is needed. With an interactive cross cultural communication, therefore confrontation between ethnic/tribal can be minimized, social tensions can be prevented, and the integrity of the Unitary Republic of Indonesia can be maintained.*

*Keywords: knit, communication, cross-cultural*

## Pendahuluan

Sudah menjadi wacana umum bahwasannya sistem budaya di Indonesia sangat heterogen baik dalam hal sistem kepercayaan, adat istiadat, tradisi, sistem nilai, bahasa, dan sebagainya. Pluralisme sistem budaya ini merupakan konsekuensi logis, karena negara dan bangsa Indonesia adalah merupakan kesatuan pulau yang berbeda etnik dan entitas budayanya. Sehingga keberagaman kultural adalah merupakan ciri esensial yang harus terus menerus dipelihara dan dilestarikan.

Keberagaman sistem budaya dan keanekaragaman entitas kultural yang ada di Nusantara adalah bukan hal yang baru. Sudah menjadi diskursus yang orang awampun tahu bahwa sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia

dirajut oleh jalinan etnis dan suku bangsa dengan berbagai identitas budayanya. Artinya, bangunan NKRI bukan dari satu entitas budaya yang tunggal, tetapi berasal dari entitas budaya yang amat sangat heterogen.

Karena heterogenitas budaya itulah, para *founding fathers* bangsa ini sejak awal sudah menyadari pentingnya ikatan heterogenitas kultural agar dapat saling menghargai dan menghormati dalam perbedaannya. Para pendiri bangsa sejak awal sudah merasakan perlunya suatu sistem yang dapat mempersatukan aneka perbedaan agar kelak tidak menjadi batu sandungan bagi keberlangsungan suatu bangsa yang, multi-etnik, ras, suku dan budaya. Semangat *unity on diversity* ditanamkan sejak tokoh-tokoh pemuda mempersiapkan diri untuk membangun suatu sosok bangsa yang mandiri. Sistem ini oleh para pendiri bangsa dimanifestasikan dalam bentuk sumpah pemuda yang dideklarasikan jauh sebelum bangsa ini berhasil meraih dan mewujudkan kemerdekaannya, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1908.

Esensi dari sumpah pemuda menurut hemat saya adalah merupakan satu tekad dari para tokoh pejuang pada saat itu agar manakala aspirasi tegaknya NKRI dapat diwujudkan maka bangunan bangsa ini akan berdiri di atas pondasi semangat kesatuan dan persatuan di tengah keanekaragaman dan perbedaan. Dengan adanya ikatan sebagai pemersatu pluralisme budaya, maka bangsa ini akan tetap dapat senantiasa berdiri kokoh dan dapat mengatasi aneka persoalan dan problema yang muncul akibat friksi yang ditimbulkan oleh atmosfer budaya yang beragam tersebut.

Jadi dapat dikatakan alangkah eloknya semangat para pemuda masa itu yang menjadi pelopor tegaknya negara kesatuan RI. Mereka telah memiliki visi dan misi kebangsaannya jauh ke depan, nasionalisme yang dapat melampaui jaman dan semangat persatuan ditengah minimnya teknologi komunikasi saat itu. Para pemuda pelopor tegaknya NKRI ini dapat dikatakan telah bisa membaca dan menengarai bahwa tegaknya NKRI yang diwarnai keberagaman tersebut membutuhkan suatu instrumen penyangga yang dapat meminimalisasi bahkan mengeliminasi sekat-sekat komunikasi antar budayanya. Sumpah pemuda adalah merupakan alat yang menjanjikan adanya solidaritas, soliditas segenap elemen etnis dan suku yang mengisi bumi nusantara di masa awal persiapan menuju kemerdekaannya.

Multikulturalisme yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan satu faktor yang tidak dapat dihindari. Hal ini tentunya harus senantiasa dikelola dan dipelihara agar tetap berada pada situasi dan kondisi yang kondusif dan menguntungkan serta bukan hal yang sebaliknya. Heterogenitas sistem budaya yang hidup sejak awal berdirinya

negara Indonesia adalah merupakan spesifikasi dan karakter yang harus diposisikan sebagai suatu kekuatan dan bukan merupakan suatu ancaman bagi utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi apabila pluralisme budaya dapat dikelola dengan baik, maka kondisi itu akan menjadikan bangsa ini selalu damai dan stabil dalam segala aspek kehidupannya. Fakta ini tentu merupakan kelebihan yang dimiliki bangsa Indonesia dan dapat menjadi contoh atau panutan bagi bangsa-bangsa lain yang memiliki karakteristik yang serupa dengan Indonesia.

Karakteristik bangsa Indonesia yang multiheterogen adalah satu modal yang luar biasa bagi eksistensinya dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini. Implikasi dari globalisasi adalah hilangnya batas wilayah dan tabir pembatas budaya antar bangsa dan dengan terjadinya penanggalan identitas primordial ini membawa konsekuensi suatu bangsa harus siap masuk dalam tata pergaulan internasional, menghilangkan sikap arogansi budayanya, menghilangkan etnosentrisme dan siap menerima infiltrasi dan hembusan gelombang budaya baru yang bisa jadi mengancam keberadaan budaya lokal yang diyakini dan diunggulkan oleh etnis atau bangsa itu. Multikulturalisme yang telah membangun eksistensi bangsa Indonesia mengakibatkan bangsa ini sudah memiliki satu sistem dan mekanisme untuk bagaimana tetap utuh, bersatu dan tetap konsisten mempertahankan keberadaan budaya masing-masing entitas tanpa harus terjebak pada kondisi etnosentrisme yang tentunya kurang menguntungkan dalam tata pergaulan internasional.

Multikulturalisme bangsa Indonesia telah memberikan kemampuan dan kedewasaan bangsa ini dalam mensikapi aneka perbedaan secara arif dan rasional. Bangsa Indonesia sudah terkondisi untuk bisa saling empati, simpati dan toleransi antar budaya tanpa harus kehilangan jati diri budaya lokal dan nilai-nilai tradisional yang dirasuknya. Kondisi ini tentu menjadi modal yang sangat berharga ketika rakyat Indonesia berada dalam situasi pancaroba perubahan budaya akibat gelombang globalisasi yang semakin intens, seiring dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi informasi. Dalam situasi yang serba multikultural dan perbedaan dalam aneka aspek dan perilaku budayanya maka rakyat sudah bisa mengantisipasi terjadinya proses akulturasi dengan sikap yang wajar, rasional dan tidak terjebak pada kondisi *cultural shock* yang membawa imbas terjadinya krisis identitas budaya akibat terlalu kagum dan terbuai oleh sistem budaya maupun sistem nilai yang datang dari luar itu.

Atmosfir multikulturalisme menjadikan bangsa ini akan lebih selektif dan proporsional manakala harus menghadapi suatu tata nilai baru. Filterisasi atas produk budaya luar yang masuk dalam habitat budayanya menjadikan bangsa Indonesia memiliki daya tangkal yang kuat bagi kemungkinan terjadinya aneka penyimpangan budaya yang dapat merusak sendi-sendi moral dan budaya yang telah dijadikan acuan dalam pola perilaku hidup kesehariannya. Dalam upaya menepis pengaruh budaya luar, masyarakat Indonesia memiliki perangkat tradisional yang disebut sebagai kearifan lokal. Semua entitas budaya di Indonesia mempunyai kearifan lokal sebagai instrumen budaya yang dapat melindungi anggota komunitas dari proses degradasi moral dan kultural.

Kearifan lokal sebagai suatu nilai budaya lokal adalah merupakan kebijaksanaan, kearifan, nilai-nilai luhur dan mulia yang tertanam dalam suatu wilayah entitas budaya dan merupakan daya tangkal terhadap “serangan budaya” dari luar. *Local genius* maupun *local wisdom* setiap suku dan etnis di Indonesia adalah merupakan identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan masyarakat bangsa ini mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing yang masuk untuk disesuaikan dengan watak dan karakter budayanya sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat bangsa di Indonesia memiliki instrumen penangkal infiltrasi budaya luar yang berupa *local wisdom* maupun *local genius* yang telah teruji kehandalannya sejak generasi terdahulu dalam memproteksi identitas budaya lokal dari infiltrasi dan intervensi budaya luar yang destruktif dan kadang jauh dari nilai kebajikan. Jadi dapat dikatakan bahwasannya nilai lokal ataupun kearifan lokal bagi setiap suku bangsa dan etnis di Indonesia ini adalah merupakan kebenaran dan kebijakan yang dengan penuh kesadaran diterima dan diterapkan oleh masyarakat dalam ruang kehidupan sosialnya secara utuh dan antar generasi. Kesadaran akan penerimaan terhadap kearifan lokal itu, menjadikan anggota komunitas budaya tersebut rela dan tanpa ragu menjadikannya sebagai acuan dan pedoman hidup yang terus menerus dijaga dan dipelihara serta diwariskan kepada generasi berikutnya. *Local wisdom* menjadi suatu identitas kultural yang menjadi ciri dan bentuk perilaku budaya suatu entitas budaya (Koentjaraningrat, 1999).

Kearifan lokal memiliki kekuatan daya tangkal terhadap terjangkit budaya luar karena kearifan lokal terbentuk dan tersusun bukan dalam satu atau dua tahun. Nilai-nilai substantif kearifan lokal tersusun melalui proses panjang dan antar generasi, sehingga hal ini wajar bila dikatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal telah teruji

keandalannya. Substansi kearifan lokal merupakan kristalisasi nilai-nilai lokal yang dianggap memiliki keunggulan, kemanfaatan dan keluhuran yang paling tinggi dari nilai lokal yang ada, sehingga kandungan nilai dalam kearifan lokal ini tidak hanya berdimensi lokal, namun seringkali berdimensi universal. Nilai-nilai humanisme adalah merupakan kandungan utama yang ada pada *local genius* atau *local wisdom* oleh karenanya maka kearifan lokal sebagai manifestasi kebudayaan dan mengalami penguatan-penguatan dalam kehidupannya/keberadannya, hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal adalah merupakan salah satu bentuk humanisasi manusia dalam berkebudayaan. Artinya, sebagai manifestasi humanitas manusia, kearifan lokal dianggap baik sehingga ia mengalami penguatan terus menerus (Ayatrohaidi, 1986).

Namun harus diakui bahwa hambatan, tantangan dan ancaman terhadap keberadaan *local wisdom* maupun *local genius* kian hari kian serius. Globalisasi sebagai fenomena universal saat ini memaksa setiap entitas budaya di muka bumi untuk melakukan hubungan lintas budaya. Interaksi dan relasi lintas budaya ini adalah merupakan kondisi yang mengancam keberadaan dan keutuhan serta keterandalan dari suatu kearifan lokal. Interaksi lintas budaya mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran sistem nilai yang ada pada suatu sistem budaya tertentu. Dalam perspektif nilai, hal ini dapat dilihat pada misalnya ukuran atau parameter nilai etis yang ada pada nilai-nilai lokal. Nilai lokal tentang kebaikan atau keluhuran suatu perilaku dalam suatu entitas budaya pada masa lalu untuk saat ini terjadi perbedaan. Etis di masa lalu belum tentu demikian di masa kini. Begitu pula dengan nilai-nilai kewajaran dalam suatu pergaulan. apa yang dianggap wajar dan diterima pada budaya masa lalu, bisa jadi saat ini dianggap tidak wajar bahkan aneh.

Pergeseran parameter dan pedoman dalam implementasi kearifan lokal yang disebabkan terjadinya arus globalisasi harus disikapi secara wajar, bijak, dan rasional. Interaksi lintas budaya adalah merupakan gelombang perubahan yang harus dihadapi dan bukannya dihindari. Dengan kewajaran sikap dalam menghadapi infiltrasi budaya luar terhadap budaya lokal, maka hal ini akan mengurangi suasana kepanikan budaya yang dapat berimbas kita menjadi bangsa yang gelap mata dengan menutup pintu rapat-rapat terhadap terjadinya proses akulturasi budaya. Kita tidak dapat menolak akulturasi budaya di era globalisasi ini, kalau kita tidak ingin menjadi bangsa yang teralienasi, terpinggirkan bahkan terkucil. Proses akulturasi budaya adalah situasi yang wajar dan aman kalau segenap anggota entitas budaya mau dan mampu menghadapinya

secara rasional. Rasionalitas yang dimaksudkan disini adalah bagaimana setiap anggota entitas ketika beradaptasi dan hendak mengadopsi nilai-nilai dari luar tetap harus mengacu dan berpedoman pada nilai-nilai lokal yang dimiliki. Tingkat kepatutan suatu nilai luar ketika hendak diterapkan dan diaplikasikan dalam ruang hidupnya harus dievaluasi apakah wajar dan patut atau tidak apabila diterapkan dalam lingkup sistem budayanya. Ketenangan dalam menghadapi infiltrasi dan rasionalitas dalam mensikapi masuknya budaya luar bagi segenap anggota entitas budaya akan menjadi modal apakah suatu nilai lokal tetap utuh, aman, dan dalam kondisi yang terlindungi atau sebaliknya.

Jadi dalam kondisi masyarakat bangsa yang sangat kental suasana multikulturalismenya, sangat plural warna/corak sistem budayanya dan sangat tinggi nilai-nilai kebhinekaannya ini maka untuk tetap menjaga keutuhan dan kebersatuannya agar terhindar dari disintegrasi dibutuhkan interaksi komunikasi antar budaya yang intens. Relasi komunikasi antar budaya ini terjadi antara anggota entitas budaya masyarakat Indonesia, dengan tetap mengacu, berpedoman dan berpegang pada nilai-nilai kearifan lokal masing-masing entitas budaya yang dimilikinya. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwasannya nilai kearifan lokal adalah merupakan identitas budaya, pedoman, dan acuan hidup bagi segenap warga sistem budaya yang memilikinya. Sehingga dalam interaksi komunikasi antar budaya di Indonesia yang sangat plural ini, tidak diperkenankan dan tidak bijaksana apabila ada pemaksaan kehendak agar nilai lokal atau kearifan lokal yang kental warna primordialnya dari suatu suku/entitas budaya dipaksakan untuk diterapkan, diimplementasikan agar menjadi suatu identitas budaya/pedoman hidup warga masyarakat di luar sistem budaya yang memiliki kearifan lokal tersebut (Adenci, Bernard T, 1996).

Budaya masyarakat yang plural merupakan kenyataan hidup (*living reality*) yang tidak mungkin ditolak dan dihindari. Kebhinekaan ini harus dipersandingkan dan bukannya dipertentangkan. Keberagaman ini merupakan manifestasi gagasan dan nilai sehingga saling menguatkan dan untuk meningkatkan wawasan dalam iklim saling mengapresiasi. Kebhinekaan menjadi bahan perbandingan untuk menemukan persamaan pandangan hidup yang berkaitan dengan nilai kebajikan dan kebijaksanaan (*virtue and wisdom*) oleh karenanya maka nilai-nilai kebhinekaan yang ada dan hidup di bumi nusantara ini hendaknya dijadikan sebagai suatu bingkai yang dapat menampakkan identitas kultural bangsa ini. Identitas budaya Indonesia adalah pluralisme itu sendiri. Jadi kalau kita melongok substansi budaya Indonesia

maka karakter yang orijinal dari sistem budaya di Indonesia adalah multikulturalisme dari aneka subkultur yang hidup dan berinteraksi dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sikap saling mengapresiasi antara sistem budaya subkultur yang satu dengan yang lainnya adalah modal utama untuk terjadinya situasi yang harmonis dan kondusif dalam tata pergaulan masyarakat bangsa di Indonesia. Dengan adanya sikap tenggang rasa antar sistem budaya subkultur maka akan terjadi toleransi antar budaya yang ujungnya adalah terciptanya sikap dan perilaku budaya antar suku/etnik yang menjunjung azas persatuan dalam keberagaman (*unity on diversity*) dan kerjasama dalam perbedaan. Paradigma ini adalah merupakan landasan ideologi yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa ini pada awal proses pencapaian kemerdekaan berbangsa dan bernegara dahulu. Namun kalau kita tilik realitas saat ini, fondasi ideologi yang menekankan pentingnya pluralisme dan multikulturalisme sebagai azas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kian hari kualitasnya kian terdegradasi. Munculnya semangat sektarianisme, etnosentrisme yang semakin kentara, *gap* komunikasi antar budaya yang semakin melebar, ini semua adalah fakta empirik yang semakin menampakkan adanya persoalan dalam relasi komunikasi antar budaya di Indonesia sekarang.

*Gap* atau kesenjangan komunikasi antar budaya diantara sistem budaya subkultur yang ada adalah suatu kondisi yang memperhatikan. Kalau tidak segera ditangani maka kesenjangan komunikasi tersebut akan semakin melebar, dan ini adalah ancaman potensial bagi munculnya kondisi disintegrasi. Celah yang memisahkan intensitas dan intimitas komunikasi antar budaya hanya bisa ditambal apabila segenap warga masyarakat di Indonesia kembali menempatkan simpul jalinan interaksi komunikasi antar budaya. Rajutan nilai dan budaya yang berbingkai heterogenitas harus dimunculkan dan menjadi acuan perilaku semua anggota entitas budaya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat tenggang rasa antar subsistem budaya harus direvitalisasi agar meminimalisir kemungkinan terjadinya friksi antar budaya. Kesadaran akan pentingnya memahami fenomena multikulturalisme juga harus terus menerus disosialisasikan dan didesiminasikan kepada warga masyarakat. Dengan adanya pemahaman akan filosofi multikulturalisme ini maka akan mengarahkan semua pihak untuk mau saling mendengar dan memahami satu dengan lainnya tanpa harus menanggalkan prinsip dan keyakinan pribadinya. Dengan penegakan filosofi multikulturalisme ini maka diharapkan warga suatu

bangsa (Indonesia) yang heterogen bisa hidup bersama-sama meskipun berbeda karakter primordialismenya, sehingga mereka akan dapat saling respek dan muncul sikap toleransi (Nugroho, 2008).

Politik multikulturalisme menawarkan kesetaraan bagi setiap anggota masyarakat dalam hal hak-hak kewarganegaraan dengan memberikan kesempatan bagi setiap kelompok masyarakat mengidentifikasi dirinya masing-masing. Dengan kata lain politik multikulturalisme mengakomodir sekaligus dua hal yang selama ini dipertentangkan yaitu kesetaraan dan perbedaan. Gagasan ini dianggap mampu meredam konflik vertikal dan horisontal yang terjadi dalam masyarakat di negara-negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi (termasuk Indonesia), akibat adanya tuntutan pengakuan atas keberadaan dan keunikan budaya kelompok etnis\suku dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian memberikan kebebasan bagi berbagai identitas kelompok untuk melaksanakan kehidupannya secara lebih otonom (Wahyuningrum, Sri Lestari, 2002).

## **Pembahasan**

### **A. Faktor Penyebab Kerenggangan Komunikasi Antar Budaya di Indonesia**

Reformasi sosial di Indonesia yang sudah berlangsung sekitar 13 tahun, membawa implikasi terjadinya perubahan di berbagai sektor kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Namun seiring dengan proses reformasi tersebut terjadi pula dampak ikutan yang merugikan yaitu banyaknya peristiwa konflik horizontal di berbagai wilayah. Imbas negatif gerakan reformasi lainnya di Indonesia adalah semakin maraknya perilaku anarkis yang dilakukan warga masyarakat. Munculnya perilaku anarkisme sosial ini juga diikuti dengan semakin mencuatnya gerakan separatisme di beberapa wilayah di Indonesia (khususnya di Papua). Konflik antar suku juga mulai menampakkan tanda-tanda kemunculannya. Diantaranya misalnya konflik antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan, penembakan para buruh dari Jawa di Aceh oleh kelompok bersenjata tak dikenal dan lain-lain. Tingginya frekuensi kekerasan dengan menggunakan atribut agama juga merupakan peristiwa yang akhir-akhir ini sering terjadi. Frekuensi terjadinya konflik horizontal di tingkat lokal (saling serang dan saling bunuh) antar warga kampung yang bertetangga

oleh karena suatu sebab yang sepele dan sederhana semakin marak. Juga muncul konflik yang melibatkan massa karena rebutan lahan pertanian antara rakyat dan pemodal dan memakan korban nyawa seperti apa yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, dan sebagainya. Itulah realita sosial yang merugikan dan mengancam semangat integrasi yang hari-hari ini sangat mewarnai dinamika kehidupan sosial politik di Indonesia.

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini perlu untuk terus dijaga dan dilindungi. Hal itu bukannya tanpa alasan, sebab fakta sosial politik memperlihatkan bahwasanya akhir-akhir ini semakin banyaknya ancaman terhadap keutuhan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fakta sosial politik menunjukkan sebagai faktor ancaman dan gangguan terhadap NKRI terlihat diantaranya adalah semangat sektarianisme yang semakin menggejala, semangat nasionalisme di kalangan generasi muda ditengarai meredup dan muncul sikap apatis. Masyarakat Indonesia saat ini mengalami krisis ketokohan seorang negarawan yang mampu merekatkan, memotivasi dan menginspirasi semangat juang dan patriotisme bangsa. Juga munculnya wacana di masyarakat yang memberikan indikasi adanya degradasi kebanggaan sebagai warga Indonesia. Keterpurukan ekonomi bangsa ini yang sudah mulai terjadi sejak tahun 1998 dan belum terselesaikan hingga hari ini memberikan implikasi munculnya sikap apatisisme sebagian besar warga masyarakat dalam mensikapi dan menghadapi aneka problema hidup yang sedang terjadi di Indonesia.

Fenomena sosial politik tersebut adalah fakta otentik yang mewarnai dan menghantui semangat solidaritas dan toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu faktor penyebab munculnya persoalan sosial politik yang mengancam integrasi bangsa di Indonesia adalah karena adanya hambatan komunikasi (*communication barrier*) dalam komunikasi antar budaya diantara entitas budaya yang hidup dan menempati ruang sistem budaya Indonesia. Kendala komunikasi antar budaya di Indonesia memiliki bentuk seperti sebuah gunung es yang terbenam di air. Hambatan komunikasi yang ada terbagi menjadi dua, yaitu yang di atas air (*above waterline*) dan di bawah air (*below waterline*). Faktor-faktor hambatan komunikasi antar budaya yang berada di bawah air adalah faktor-faktor yang membentuk perilaku atau sikap seseorang, hambatan semacam ini cukup sulit untuk dilihat atau diperhatikan. Jenis-jenis hambatan semacam ini adalah salah satunya berupa ketidaktulunan dalam menjalin interaksi atau dikenal sebagai *mindlessness*. Dalam konsep ini ketika orang

melakukan kontak komunikasi antar budaya dengan orang dari suku atau etnis lain lebih cenderung bersifat reaktif daripada proaktif. Sikap ataupun perilaku reaktif ini lebih disebabkan karena adanya faktor *emotional vulnerability*. Ketika seseorang berkomunikasi dengan pihak lain (orang dari etnis/suku yang berbeda) maka identitas kelompoknya (identitas kultural) dan identitas individu (sifat-sifat kepribadian) akan mempengaruhi cara-cara seseorang dalam berpersepsi, berpikir, dan berperilaku.

Perilaku komunikasi yang bercorak *mindless* dan bersifat *emotional vulnerability* ini juga disebabkan oleh karena adanya unsur ketidakpastian (*uncertainty*) dan kecemasan (*anxiety*) pada seseorang. Ketidakpastian adalah suatu kondisi ketika seseorang tidak mampu memperkirakan dan memahami perilaku, perasaan, sikap, dan nilai yang ada pada etnis/suku lain. Kecemasan adalah merupakan perasaan cemas, khawatir, curiga tentang perilaku dan sikap dari etnis lain. Kedua hal inilah (kecemasan dan ketidakpastian) merupakan faktor penghambat komunikasi antar budaya (*below waterline*) yang cukup sulit untuk dilihat namun sangat potensial dalam memunculkan tindakan atau perilaku yang tidak fungsional dalam kontak komunikasi antar budaya. Manifestasi dari unsur *uncertainty* dan *anxiety* adalah sikap tidak peduli, ketidakhangatan dan hilangnya rasa empati, melakukan pembatasan dan penghindaran serta lebih bersikap reaktif (cenderung berpikir negatif) dan memusuhi ketika harus melakukan relasi komunikasi budaya dengan etnis atau suku lain (Dood, Carley H. 1998).

Dalam masyarakat yang tersekat-sekat berdasarkan sistem budaya yang dimilikinya (seperti di Indonesia) menyebabkan mudah munculnya komunikasi antar budaya yang terhambat oleh faktor *mindless* dan sangat bersifat *emotional vulnerability* tersebut. Imbas dari hal itu adalah menghambat proses terjadinya harmonisasi, interaksi antar budaya yang setara (*equal*) dan semangat mengapresiasi. Masing-masing etnis/suku menempati dan berada pada ruang budayanya sendiri-sendiri, berdiri pada area interaksi yang eksklusif sehingga ada jarak yang membatasi terjadinya bentuk komunikasi antar budaya. Akibat *gap* atau kesenjangan komunikasi antar budaya diantara etnis atau suku yang ada maka upaya untuk mengokohkan jalinan komunikasi antar budaya dalam rangka meminimalisasi terjadinya kesalahpahaman budaya (*cultural misunderstanding*) sulit untuk direalisasikan. Kesenjangan komunikasi antarbudaya diantara suku atau etnis justru cenderung mengarah pada terjadinya proses penghindaran komunikasi (*communication avoidance*). Dampak dari ini semua adalah hilangnya peluang untuk terjadinya keterpaduan sosial. Yang dimaksudkan

dengan keterpaduan sosial di sini adalah suatu keadaan dimana terjadi komunikasi yang setara, saling menghargai, saling menghormati di antara etnis atau suku yang ada tanpa harus menanggalkan identitas budayanya masing-masing. Ketika proses keterpaduan sosial ini terhambat, maka akan memunculkan implikasi yang serius yakni upaya-upaya dalam membangun kebersamaan (*common will*) sebagai suatu bangsa sulit dicapai dan menjadi angan-angan yang tidak berujung.

*Gap* komunikasi antar budaya yang disebabkan oleh adanya sekat-sekat identitas budaya inilah yang seringkali menjadi pemicu terjadinya disharmoni dan konflik antara kelompok masyarakat. Konflik ini acapkali dilandasi oleh *prejudice* atau prasangka negatif yang kuat dari suatu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat yang lain. Manifestasi konflik yang berangkat dari prasangka ini (*extermination*) adalah dalam bentuk permusuhan atau penghancuran terhadap kelompok etnis/suku lainnya. Hal ini sudah beberapa kali terjadi, secara internasional hal itu terjadi di Jerman ketika Hitler hendak memusnahkan bangsa Yahudi, di Bosnia, ketika penduduk Muslim dibantai, konflik horizontal antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda Afrika, dan lain-lain. Hal semacam ini juga terjadi di Indonesia yaitu ketika terjadi konflik antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan, antara kelompok Muslim dan Kristen di Ambon dan Poso, serta konflik yang disulut kebencian pada etnis Cina. Konflik-konflik ini memperlihatkan pada kita semua bahwa kesatuan, keramahtamahan dan bangsa yang menjunjung tinggi rasa dan nilai kemanusiaan yang selama ini sering didengungkan ternyata acapkali hanya bersifat slogan dan angan-angan. Sebab kian hari kita sering mendengar dan membaca terjadinya konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang brutal, bengis, dan mengabaikan rasa kemanusiaan. Konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat sudah merupakan tanda-tanda terjadinya upaya untuk menghilangkan atau memusnahkan satu kelompok budaya oleh kelompok budaya yang lain.

Di samping faktor-faktor yang sifatnya *below the waterline* seperti terurai di atas, faktor terjadinya *gap* komunikasi antar budaya yang bersifat *above the waterline* adalah berupa persoalan sosial politik, distribusi ekonomi yang tidak merata, frustrasi sosial akibat kesulitan ekonomi, dan lain-lain. Terjadinya reformasi politik di Indonesia memberikan implikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Implikasi itu baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Salah satu imbas negatif dari proses reformasi ini adalah melemahnya kepercayaan publik pada aparat pemerintah. Penegakan fungsi aparat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif mengalami

penurunan. Akibatnya rakyat kehilangan kepercayaan dan mengalami disorientasi akibat situasi yang penuh ketidakpastian ini (*uncertainty*), rakyat menjadi frustrasi dan mudah terjebak melakukan tindakan-tindakan destruktif. Frustrasi sosial yang menyelimuti Suasana kebatinan rakyat menyebabkan rakyat seringkali menyelesaikan persoalannya dengan aksi-aksi kekerasan yang bersifat masif. Dalam upaya untuk memperoleh dukungan massa kelompok budayanya (solidaritas sosial/kelompok) persoalan konflik yang semula hanya persoalan biasa, kemudian dibumbui dan dikemas dengan isu persoalan SARA. Akibatnya konflik berkembang dan bergeser ke persoalan SARA. Dampaknya adalah konflik menjadi semakin intens, masif dan kompleks.

Demikian pula halnya dengan persoalan distribusi ekonomi yang tidak adil. Rakyat merasakan bahwa hak-hak ekonomi dirampas. Hal itu seperti apa yang terjadi di Freeport Papua, Mesuji Lampung maupun di beberapa lokasi lain. Lahan yang semula diakui sebagai tanah warisan leluhur dari penduduk lokal kemudian diambil alih secara paksa oleh perusahaan-perusahaan raksasa untuk membudidayakan tanaman industri. *Impact* dari situasi ini memicu warga sekitar lokasi yang merasa sebagai pemilik sah untuk merebut kembali hak-haknya. Dalam konflik semacam ini nampak bahwa penggalangan massa warga asli maupun pemilik lahan (kaum pemodal) seringkali memanfaatkan atribut dan identitas kultural. Sehingga persoalan kebutuhan lahan ini diwarnai juga dengan isu yang bernuansa sektarian dan primordialisme. Pada sisi lain, dalam situasi tersebut nampak bahwa pemerintah sebagai pelindung rakyat seringkali memperlihatkan kecenderungan untuk lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal. Rakyat merasa kehilangan pengayoman, sehingga mengarahkan mereka untuk bertindak lebih brutal dan anarkis. Disparitas ekonomi adalah variabel yang memiliki pengaruh yang kuat untuk terjadinya *gap* komunikasi diantara kelompok dalam satu sistem sosial. Sebab hal ini memudahkan untuk terjadinya stereotipe kelompok sosial yang secara ekonomi mapan dengan mereka yang kurang beruntung. Stereotipe akibat ketimpangan ekonomi sangat mudah dimanfaatkan sebagai pemicu dan pemacu terjadinya friksi sosial. Konflik sosial tersebut akan semakin mudah tersulut manakala jurang pembatas sosial ekonomi ini kuga mengkait dengan identitas budaya diantara kelompok sosial yang berbeda status sosial ekonominya itu.

Begitu pula halnya di bidang politik. Praktik reformasi politik di Indonesia menghasilkan suatu kesepakatan untuk memberlakukan otonomi daerah. Simpul kekuasaan yang di masa Orde Baru di tangan pusat (sentralistik) dikembalikan

kewenangannya ke daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota (desentralisasi). Namun pelaksanaan otonomi daerah yang semula dimaksudkan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam prakteknya yang terjadi justru sebaliknya. Otonomi lokal ibaratnya hanya memindahkan episentrum kecurangan, manipulasi dan korupsi dari pusat ke daerah. Banyak terlihat praktik-praktik yang kurang elok terjadi dalam sistem pemerintahan di daerah. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan terjadinya proses rasialisme/diskriminasi kesukuan. Hal ini terlihat dengan munculnya aturan tak tertulis yang berupa kesepakatan bersama diantara warga lokal bahwa yang berhak, menduduki kursi bupati/walikota/gubernur hanyalah putra daerah. Konsep putra daerah ini menunjukkan adanya unsur eksklusifitas kultural warga lokal dalam pemilihan kepala daerah. Pemahaman tentang konsep putra daerah mengarahkan pada pengertian bahwa hanya mereka yang berasal dari sistem budaya dan sistem sosial wilayah itulah yang berhak menjabat sebagai petinggi di daerah itu. Kondisi ini merupakan praktik diskriminasi dan pengingkaran bahwa warga negara Indonesia itu berasal dari berbagai latar belakang etnis, suku, agama dan sebagainya. Sehingga idealnya siapapun dia, dan dari etnis/suku apapun dan berlatar belakang keyakinan apapun berhak untuk menjadi pemimpin di suatu wilayah asalkan dia cakap dan mampu untuk menjalankan amanahnya itu. Dalam konsep putra daerah ini muncul sikap rasialis yang mengingkari prinsip kebhinekaan yang menjadi dasar dan pedoman kehidupan berbangsa di Indonesia. Paradigma putra daerah ini meskipun bersifat informal namun nyata dan berkembang kuat di masyarakat Indonesia sekarang. Fenomena tersebut adalah merupakan kondisi yang sangat kuat mengerosi semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab fakta ini adalah merupakan bentuk pengingkaran terhadap semangat multikulturalisme dan pluralisme yang ada dan hidup di Indonesia. Hal itu juga merupakan faktor potensial untuk terjadinya kesenjangan komunikasi budaya antar entitas budaya yang ada di Nusantara.

## **B. Merajut Kembali Komunikasi Antar Budaya yang Terkoyak**

Saat ini bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki karakter pluralisme budaya sedang dihadapkan pada problema yang terkait dengan kondisi tersebut. Perseteruan dan konfrontasi antar kelompok, antar suku dan komunal frekuensinya semakin meningkat dan intensitasnyapun juga semakin meninggi. Aksi yang dilakukan

oleh pihak-pihak yang berseteru sudah tidak memberikan toleransi dan perlindungan kepada nilai kemanusiaan. Kemajemukan budaya itu acapkali menjadi justifikasi dan legitimasi antar kelompok untuk bertikai. Seolah-olah apabila konflik yang dilakukan itu didasarkan dan memiliki alasan pembenaran yang sifatnya “membela dan mempertahankan” kepentingan dan identitas budayanya, maka kelompok itu boleh melakukan praktik-praktik kekerasan dengan cara apapun dan melibatkan massa sebanyak-banyaknya. Potret kondisi sosial ini mencerminkan betapa bangsa ini sebenarnya memiliki sisi rapuh dalam bangunannya sebagai negara bangsa. Ancaman konflik yang bernuansa SARA dan diselimuti semangat primordialisme bisa datang setiap saat, kapanpun dan dimanapun.

Jadi semangat persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika seringkali hanya sebatas simbolik dan slogan yang kosong tanpa makna. Lalu apakah atmosfer seperti ini hanya kita diamkan dan lalu berharap datangnya keberuntungan yang menjaga masyarakat ini terhindar dari konflik dan pertikaian antar kelompok atau antar entitas budaya. Jawabnya tentu saja tidak, sebagai bangunan negara bangsa yang majemuk dalam berbagai sudut kehidupan kita wajib untuk melakukan upaya-upaya preventif agar ikatan pergaulan dan persaudaraan sebagai sebuah bangsa yang hidup dalam negara yang bernama NKRI agar tetap solid, kondusif dan tetap utuh. Kita sebagai warga masyarakat tentunya berkewajiban untuk menjaga agar jalinan komunikasi antar budaya diantara semua etnik, suku dan kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, tetap saling mengapresiasi dalam semangat integrasi dan keselarasan.

Upaya-upaya preventif atau pencegahan seperti apa yang dapat dilakukan agar semangat kesetaraan, persaudaraan dan toleransi antar semua anak bangsa di Indonesia ini dapat terjaga. Yang dapat dilakukan adalah bahwa potensi konflik yang bernuansa SARA dan diwarnai semangat primordialisme dapat diminimalisasikan apabila ada upaya yang mendasar untuk meredam potensi/sumber ancaman kemungkinan terjadinya konflik horizontal. Resolusi yang dilakukan oleh *stakeholder* (khususnya pemerintah) terhadap konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia baru sebatas meredusir ketegangan dengan memposisikan dirinya sebagai fasilitator dan mediator diantara pihak yang bertikai agar ditemukan kesepakatan damai. Aparat pemerintah idealnya bertindak lebih jauh dari hanya sekedar sebagai penengah atau juru damai. Sebab posisi sebagai mediator ini tidak akan pernah menyentuh substansi persoalan. Akar penyebab munculnya pertikaian tidak dapat diformulasikan suatu cara atau

metoda untuk menghilangkannya. Akibatnya damai yang tercipta hanya bersifat formalitas, sporadis dan rapuh. Suatu saat akan kembali terjadi konflik, seperti saat ini terlihat di Ambon, kesepakatan damai sangat bersifat formal di permukaan, akar persoalan yang hakiki belum tercerabut dan dimusnahkan. Akibatnya masih seringkali terjadi konflik-konflik horizontal di sana oleh karena suatu persoalan yang tidak prinsip.

Upaya penyelesaian yang harus dilakukan untuk meminimalisir bahkan mengeliminasi terjadinya konflik SARA harus dilakukan dengan konkret. Proses resolusi damai harus dilaksanakan lewat dialog dan komunikasi politik yang matang, dua arah dan benar-benar menciptakan suatu kondisi yang konvergen. Di samping itu pemerintah juga dituntut untuk memformulasi suatu kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjadi acuan dan pedoman dalam mencegah dan menghilangkan kemungkinan terjadinya konflik ulangan. Langkah-langkah strategis dan kebijakan tersebut harus dapat meminimalisir kesalahpahaman yang sekarang ini terjadi diantara kelompok yang bertikai.

Dewasa ini pengokohan kembali rajutan komunikasi antar budaya diantara semua etnik yang ada di bumi Indonesia amat sangat dibutuhkan. Karena harus kita akui dengan jujur bahwasannya kita sebagai bagian dari sistem sosial yang multikultur selama ini tidak atau belum pernah melakukan suatu dialog komunikasi antar budaya yang serius, intensif dan efektif. Dialog komunikasi antar budaya diantara warga masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang subkulturnya adalah merupakan suatu upaya dalam rangka membangun relasi antar manusia di Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman dan menghapus sekat-sekat penghalang relasi antar budaya. Interaksi komunikasi antar budaya yang selama ini terjadi masih bersifat semu, tidak substantif dan bersifat mengambang. Proses komunikasi antar budaya saat ini masih cenderung tidak mencerminkan adanya ketulusan dari kedua belah pihak, yaitu tidak mengatakan apa yang sebenarnya hidup dalam pikiran dan hatinya. Dalam keadaan demikian komunikasi hanya sekedar untuk berbasa-basi. Komunikasi tidak menyampaikan pesan yang sebenarnya (Utama, 2000).

Dalam upaya lebih mengintegrasikan hubungan antar etnis dan suku di Indonesia dibutuhkan konstruksi komunikasi antar budaya yang memberi peluang masing-masing kelompok subkultur dapat menjalin interaksi yang sepadan (*equal*). Kesetaraan ini adalah akibat dari proses komunikasi yang saling menegosiasikan

karakteristik dan identitas kultural-kulturalnya di dalam sistem sosial yang majemuk. Di Indonesia, relasi komunikasi antar budaya seperti itu sangat dibutuhkan karena merupakan prasyarat yang sangat strategis untuk terjadinya atmosfer saling tenggang rasa. Komunikasi antar budaya yang setara merupakan satu kebutuhan yang hakiki untuk diaktualisasikan karena sampai saat ini belum tercipta satu model komunikasi yang dapat dijadikan instrumen interaksi antar kelompok yang mampu mengurangi sekat-sekat hubungan antar budaya.

Tradisi dialog antar budaya diantara kelompok subkultur juga merupakan medium yang sangat strategis dalam upaya membangun atmosfer saling pengertian. Dengan dialog maka masing-masing pihak dapat memposisikan pihak lain sebagai subyek, karena dialog adalah merupakan satu bentuk komunikasi yang paling etis untuk menjadikan entitas lain sebagai pihak yang berharga. Perilaku menghargai eksistensi pihak lain ini diharapkan dapat mengukuhkan dan mengokohkan integrasi dan akomodasi transaksi relasi budaya. Dialog antar budaya ini juga diarahkan agar masing-masing pihak perlu untuk memahami pentingnya etika dalam merespon fenomena di sekitarnya seperti apa yang dilakukan ketika merespon fenomena yang ada di dalam fenomena kelompok budayanya sendiri. Jadi dengan dialog antar budaya adalah merupakan suatu upaya agar tercipta kondisi saling berempati. Kepekaan sosial dalam bentuk empati antar kelompok subkultur memungkinkan terciptanya komunikasi antar budaya yang *mindfull* (Ting Toony, Stella, 1999).

Untuk menciptakan komunikasi antar budaya yang integratif dan kondusif dikenal dua model komunikasi yang mengarah pada terciptanya hal itu. Yang pertama adalah model pendekatan yang bercorak *third culture building* (bangunan budaya ketiga) dan multikulturalisme (Casmir, Fred, L. 1993). Dalam model *third culture building* berangkat dari asumsi bahwa transaksi komunikasi antar budaya dapat efektif jika para partisipan berusaha dengan keras untuk menyumbangkan *third culture building*, yaitu mengintegrasikan latar belakang kultural kedua belah pihak untuk menghasilkan sebuah pengalaman kultural baru dan berbeda yaitu pengalaman kultural yang dipadukan (*overlapping cleavage*).

Sedangkan interaksi komunikasi antar budaya lainnya adalah multikulturalisme. Model ini berusaha untuk menjaga, menghormati, menghargai adanya kemajemukan budaya. Dalam model komunikasi antar budaya yang berdimensi multikulturalisme ini masing-masing entitas subkultur berusaha untuk mempertahankan dan sekaligus memperkenalkan karakteristik sistem budayanya. Entitas subkultur tetap berusaha

memelihara orijinalitas budaya yang dimiliki. Dengan memperkenalkan identitas budayanya diharapkan entitas subkultur yang lain bisa memahami dan berupaya untuk bertoleransi. Ketika masing-masing entitas subkultur mempunyai pemahaman akan karakteristik budaya subkultur lainnya maka diharapkan terjadi suasana saling menghormati perbedaan. Kondisi inilah yang dapat menjadi faktor munculnya kontak komunikasi antar budaya yang sepadan dan adaptif (saling menyesuaikan).

Selain itu komunikasi antar budaya yang konstruktif dapat dikonsolidasikan dengan memanfaatkan instrumen kelembagaan yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Untuk memperteguh nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang heterogen di berbagai aspek maka lembaga pemerintah khususnya institusi komunikasi harus memainkan perannya secara optimal. Institusi komunikasi informasi dituntut untuk bisa membangun iklim solidaritas dan adaptatif diantara etnis dan suku yang ada. Untuk memenuhi tanggung jawabnya itu maka institusi komunikasi harus bisa mendistribusikan informasi serta menanamkan kesadaran pada publik bahwasannya tegaknya nilai-nilai kebangsaan di Indonesia bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah namun merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk seluruh komponen warga masyarakat. Dengan demikian maka lembaga komunikasi informasi harus melakukan upaya-upaya yang sifatnya peneguhan akan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan, pluralisme dan semangat tenggang rasa antar budaya oleh semua elemen masyarakat.

## Penutup

Paska reformasi sosial politik di Indonesia eskalasi konflik horizontal yang diwarnai semangat primordialisme semakin meningkat. Peningkatan intensitas dan frekuensi konflik antar etnis sangat membahayakan kerekatan hubungan berbangsa di antara etnis dan suku yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan ancaman bagi keutuhan NKRI.

Kearifan lokal masing-masing entitas budaya yang selama ini diyakini keampuhannya sebagai alat proteksi interfensi terhadap budaya lokal pada satu etnis subkultur dan sebagai instrumen untuk mereduksi ketegangan antar etnis atau suku akhir-akhir ini melemah keberadaannya. Konfrontasi dan pertikaian lebih banyak

diselesaikan dengan pendekatan keamanan daripada musyawarah di antara tokoh-tokoh adat etnis/suku yang bertikai.

Untuk itu dibutuhkan suatu cara mengukuhkan dan mengokohkan kembali interaksi antar budaya. Relasi antar budaya diantara entitas subkultur dapat direvitalisasi dengan mengembangkan pola dan model komunikasi antar budaya yang adaptatif, toleran dan sinergis.

Apabila komunikasi antar budaya yang setara dan dilandasi semangat tenggang rasa benar-benar dapat diwujudkan secara serius, maka cita-cita tetap terpeliharanya masyarakat yang integratif dan kondusif sepanjang waktu bukanlah suatu keniscayaan. Untuk itulah maka menjadi tugas semua stakeholder di Indonesia agar memiliki komitmen untuk saling berinteraksi secara sirkular dan konvergen agar cita-cita tersebut dapat menjadi kenyataan dan bersifat permanen tidak hanya bersifat formalistik dan temporer.

## Daftar Pustaka

- Adenci, Bernard T (1995). *Etika Sosial Antar Budaya*. Yogyakarta, Kanisius
- Ayatrohaidi (1986). *Kepribadian, Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta, Pustaka Jaya
- Cashmir, Freed L (1993). *Third Culture Building: A Paradigm Shift for International and Intercultural Communication*. New York, Sage Publication
- Dood, Carly, H. (1998). *Dinamic Intercultural Communication*. New York, McGraw Hill
- Koentjoroningrat (1999). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Jembatan
- Nugroho, Heru (2008). *Multikulturalisme dan Disintegrasi Bangsa*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ting Toomey, Stella (1999). *Communicating a Cross Cultural*. New York, The Guilford Publication

Utama, Jacob (2000). *Rekomunikasi dalam Masyarakat yang Tidak Tulus*. Yogyakarta, Majalah Basis, No. 05-06, Mei-Juni, 2000

Wahyuningrum, Sri Lestari (2002). *Pertanyaan Untuk Multikulturalisme*, Kompas Online